

kehidupan. Mengutip pendapat Paulo Freire, mereka hanya *live in the world*, bukan *live with the world*. *Live with the world* artinya seseorang itu hidup di dunia dengan ikut berproses dan menjadi subjek. Terlibat dalam proses kreasi dan rekreasi sejarah. Sedangkan *live in the world*, artinya hidup di dunia baru pada tingkatan survival. Yang penting adalah hidup, bisa makan dan minum. Semua fasilitas diberikan, tapi tidak menyentuh akar persoalan dan memberikan perubahan secara substantif.

Sebagai sebuah pendidikan nilai, pendidikan agama memiliki peran besar dalam menghadapi korporatisasi pendidikan. Namun ternyata pendidikan agama hanya sebatas pengetahuan, bukan pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Bila dikaitkan dalam wacana pluralisme, pendidikan agama belum memberikan perspektif pluralis dan multikulturalis bagi peserta didik. Harapannya terletak pada kreativitas guru, namun yang terjadi berikutnya adalah guru justru dituntut oleh persoalan administratif yang melelahkan. Terkait dengan hal ini, Romo Suhardiyanto mengungkapkan bahwa negara sangat menghambat proses pendidikan yang lebih progresif. Romo menceritakan pengalaman Keuskupan Agung Semarang, di mana semua pelajaran agama tingkat SMP dan SMA di Yayasan Katolik diganti dengan pendidikan religiusitas (pendidikan agama Katolik hanya khusus bagi pelajar Katolik). Di sini, murid berbagai agama saling berbagi pengalaman berdasarkan agama masing-masing. Kebijakan ini ternyata mendapat teguran dari Bimas Depag. Mereka menilai, bahwa yang diajarkan

seharus-nya adalah pendidikan agama Katolik.

Berbicara tentang sistem, Pak Syaifuddin, dosen UII yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem Ujian Nasional. UN menjadi standar keberhasilan sekolah. Sehingga dari 6 semester proses pendidikan, selama 1 semester hanya dikhususkan untuk persiapan UN. Sehingga yang terjadi saat ini adalah persaingan antar sekolah dan yang menjadi korbannya tentu saja peserta didik. Saudara Wahyudin dari KODAMA juga menyepakati hal ini. Ia menilai UN hanya mendorong siswa untuk menghafal. Selain itu, jika kita mencermati sertifikasi guru, ternyata sebagian besar uang yang diterima bukan untuk peningkatan kapasitas para guru, melainkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berhadapan dengan sistem memang bukan hal yang mudah. Sistem selalu berkaitan dengan kekuasaan dan orang lain. Persoalan sistem tidak bisa diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan dialog intensif dengan pengambil kebijakan dan segala upaya dari berbagai jalur perlu dilakukan. Pak Syaifuddin memberi perumpamaan kapal kecil yang berada di tengah laut luas. Membentur air laut hanya akan menenggelamkan kapal. Yang perlu dilakukan adalah, memanfaatkan angin dan ombak untuk sampai ke pulau tujuan.

(Ira Sasmita)

## SUSUNAN REDAKSI Newsletter Guru Merdeka

**Tim Redaksi:** Listia, Ira Sasmita, Indro Suprobo, Sarnuji, **Bendahara:** Eko Putro Mardiyanto, **Diterbitkan oleh** Forum Komunikasi Guru-guru Agama (FKGA) Jogjakarta. **Alamat Redaksi:** Perum Banteng Baru, Jl. Banteng Utama 59, Jogjakarta, Telp. 0274-880149.  
Website: <http://www.guru-merdeka.blogspot.com>  
**Redaksi menerima tulisan tentang Pendidikan**

# Newsletter

# Guru Merdeka

Edisi Juli 2010

Media Forum Komunikasi Guru Agama Jogjakarta

## Dari Redaksi

Persaingan dalam situasi masyarakat yang sejahtera berkeadilan bisa saja menjadi pemicu semangat untuk sampai pada batas pencapaian yang lebih baik. Namun sebuah persaingan yang terjadi dalam masyarakat yang masih diwarnai kesenjangan dalam kesejahteraan serta akses pada berbagai sumber yang lebih memampukan masyarakat, persaingan bebas tentu hanya menjadi ajang peminggiran kelompok lemah. Hal yang diharapkan dalam kerangka pembebasan, yang perlu dilakukan justru persaingan dalam pelayanan, bukan persaingan dalam mengejar penguasaan materi maupun persaingan mendapatkan otoritas.

Kita bisa membayangkan biasanya ketika manusia melihat aktivitas kehidupan dalam kerangka persaingan, maka yang dihargai dan dihormati hanya mereka yang mampu, kuat, berkuasa atau mereka yang memenangkan persaingan. Kekuasaan menjadi tujuan karena dengan kekuasaan bisa melanggengkan kekuatan dan memungkinkan dilakukan perluasan kekuasaan. Sementara dalam kehidupan manusia yang majemuk

dan ada kalanya penuh resiko, selalu ada pihak-pihak yang tidak mampu dan tidak cukup punya kuasa untuk bersaing. Kelompok lemah menjadi makin lemah hingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat karena macetnya mobilitas dan dinamika masyarakat.

Mencermati perkembangan akhir-akhir ini, mungkinkah spirit persaingan bebas-- ini tanpa disadari mulai menggejala dan mulai mengarahkan dunia pendidikan kita?. Persaingan bebas dalam dunia pendidikan kurang signifikan dirasakan dalam relasi anak per anak. Namun para orang tua pada umumnya sangat menyadari hal ini, yaitu beratnya upaya mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Meskipun UUD 1945 mengamanatkan penyelenggara Negara sebagai penanggung jawab penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik mungkin kepada semua generasi muda dan seluruh warga Negara, kenyataannya pelayanan itu masih terbatas, tidak merata dan diserahkan kepada keberuntungan nasib yang seringkali hanya bisa dirasakan segelintir orang. Selebihnya generasi muda harus

bersaing di mana pemenang yang bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas tentu saja generasi muda yang pandai atau dari keluarga-keluarga kaya yang bisa membayar fasilitas dan tenaga pendidik yang bermutu.

Apa efek jangka panjang ketika tidak ada pemerataan dalam kualitas layanan pendidikan yang diterima generasi muda? Bukankah dengan demikian dunia pendidikan turut andil dalam melanggengkan kesenjangan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan bangsa? Bagaimana para praktisi pendidikan agama menanggapi hal ini? Bagaimana pendidikan agama bisa menawarkan pandangan yang mengkritisi situasi yang berdampak pada ketidakadilan melalui proses pendidikan ini? Bila semua agama menyuarakan keberpihakan pada yang lemah, akankah guru-guru agama hanya diam menunggu apa yang terjadi selanjutnya? Kapan kiranya para guru bisa lebih lantang menyuarakan keberpihakan secara lebih kongkret pada persoalan keadilan terutama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas?

Forum Komunikasi Guru-Guru Agama (FKGA) di Jogjakarta telah berusia lima tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran bersama para guru agama dari berbagai latar agama, dengan senantiasa memperbaharui komunikasi yang mampu menjaga modal bersama yaitu nilai-nilai universal yang ada dalam agama-

agama yang termuat dalam Pancasila. Akankah gerakan para guru ini mampu mendorong sikap kritis agar dunia pendidikan di Indonesia kembali pada ideologi Pancasila yang mementingkan keadilan dan bukan persaingan?

Newsletter Guru Merdeka edisi Juli 2010 ini akan mengupas sebgaiian dari proses pembelajaran para guru yang tergabung dalam FKGA tentang masalah yang akan berimplikasi pada kehidupan jangka panjang bangsa Indonesia. Pembaca yang budiman juga akan turut mengikuti jalannya diskusi bulanan FKGA yang dilakukan pada bulan Juni 2010.

Selamat membaca.

### DISKUSI BULANAN FKGA "KORPORATISASI PENDIDIKAN"

Diskusi bulanan FKGA dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juni 2010 di FKIP IPPAK Sanata Dharma (Jl. Ahmad Jazuli No. 2 Jogjakarta). Tema diskusi kali ini adalah *Evaluasi Paradigma Pendidikan di Indonesia*, dengan narasumber Agus Nuryatno, S. Ag., MA., Ph.D (Dosen Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan penulis buku Pendidikan Mazhab Kritis).

Tema ini masih berkaitan dengan diskusi bulan sebelumnya yaitu tentang administrasi pendidikan yang memberatkan dan menghabiskan sebagian besar perhatian para guru, sehingga proses pengajaran di kelas terbengkalai. Muncullah satu pertanyaan mendasar, apakah kekeliruan dalam membuat kebijakan administrasi pendidikan ini didasarkan pada kesalahan paradigma/landasan pemikiran pendidikan yang dikembangkan di Indonesia? Pertanyaan itu menjadi bahan diskusi berikutnya dengan tujuan untuk melihat dan mengevaluasi kembali paradigma pendidikan yang dikembangkan di Indonesia.

Pak Agus Nuryatno melihat adanya upaya korporatisasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Lembaga pendidikan tak ubahnya seperti sebuah perusahaan. Ini dapat dilihat dalam beberapa hal, *pertama*, UU BHP yang sekarang sudah dihapus oleh MK. Melihat isinya, ada banyak istilah ekonomi yang masuk di dalamnya. Efisiensi, produktivitas, pailit, profit dan lain-lain. *Kedua*, Perpu No. 77/2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka serta penanaman modal. Pendidikan termasuk sektor bidang usaha terbuka untuk penanaman modal asing dengan kepemilikan modal sekitar 65%. *Ketiga*, fenomena kastanisasi dan diskriminasi pendidikan, seperti dimunculkannya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI),

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan lain-lain. Lebih lanjut, Pak Agus menegaskan, sekolah dengan kualitas bagus selalu identik dengan biaya mahal dan kita bisa menebak kelompok masyarakat mana yang bisa mendapatkan segala kualitas ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan kita saat ini baru sebatas kekuatan reproduktif, belum kekuatan produktif. Artinya, pendidikan kita hanya menjadi media reproduksi struktur sosial lama, bukan media mobilitas yang menciptakan struktur sosial baru.

Ideologi perusahaan didasarkan pada kompetisi dan hanya melahirkan dua oposisi biner, pemenang dan pecundang. Ini sangat jelas terlihat dalam dunia pendidikan kita. Yang selalu dihargai adalah anak-anak cerdas, berprestasi dan mampu. Mereka disuruh berkompetisi satu sama lain. Jika ini menjadi dasar pendidikan kita, maka akan ada ribuan anak-anak yang tidak akan mendapatkan penghargaan selama hidupnya. Padahal pendidikan kita seharusnya tidak melakukan diskriminasi. Bila melihat semangat Pancasila, nilai yang ditanamkan justru kooperatif. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, yang ada hanyalah kerjasama dan kebersamaan. Anak-anak yang pintar akan membantu anak-anak yang kurang, sehingga yang mendapat penghargaan adalah semua anak.

Selain gejala korporatisasi dunia pendidikan, fenomena lain yang ditemui dalam dunia pendidikan Indonesia adalah pragmatisme pendidikan. Saat ini, tugas utama pendidikan adalah bagaimana membentuk seseorang agar memiliki kemampuan teknis dalam dunia industri. Ilmu yang diberikan lebih bersifat praktis dan mudah diserap. Pendidikan tak lebih hanya bersifat adaptif dan pasif terhadap

yang mempunyai keberpihakan serius kepada anak-anak yang tidak beruntung dan dikategorikan sebagai anak bodoh karena situasi dan kondisi tertentu. Keberpihakan guru dan sekolah secara umum lebih banyak untuk para pengawas pendidikan atau sistem yang menentukan berbagai standarisasi dalam pendidikan.

Dalam situasi ini anak yang *ter-bodohkan* (oleh keadaan) dianggap tidak layak mendapat penghargaan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Apa jadinya ketika anak-anak yang *ter-bodohkan* dan miskin selalu tidak mendapatkan penghargaan sehingga mempunyai citra diri yang sangat rendah dan menjadi sering kalah dalam kehidupan? Akan terjadi situasi di mana kelompok orang kaya akan makin kaya dan kelompok orang miskin makin banyak dengan segala kompleksitas persoalannya.

Barangkali akan dianggap berlebihan bila dikatakan bangsa ini bermain-main dalam soal pendidikan. Sesuatu yang menyangkut kualitas hidup bersama jangka panjang, dirancang dan dipraktekkan dengan menyesuaikan diri mengikuti tuntutan standar internasional dan tidak pertama-tama mengutamakan dan mengacu pada kebutuhan situasi kehidupan masyarakat kita sendiri. Apakah mungkin bangsa ini bisa memenangi persaingan global ketika pendidikan yang dipraktekkan menyisakan ketidakadilan berkelanjutan. Simaklah, akan makin banyak peserta didik yang sukses

dalam pendidikan, yang tidak memikirkan bangsanya, melainkan memilih bekerja di luar negeri yang lebih dihargai (dalam pengertian digaji lebih mahal), bergelimang harta dan tidak bahagia. Bukankah ini salah satu dari yang dimaksud mengapa ada standar internasional? Siapa yang menjadi pemenang sesungguhnya dalam persaingan global yang diandaikan ini? Bukan siapa-siapa, pastinya mereka, dan bukan bangsa pecundang yang mengabaikan situasi hidup seluruh warganya.

Tetapi adakalanya turun hujan di musim kemarau. Ketika para guru lebih setia pada kebutuhan peserta didik daripada mengutamakan tuntutan formalisme sistem pendidikan, semakin banyak kekuatan kodrati peserta didik yang mekar untuk menemukan jalan pembebasan bagi kemerdekaan dan keadilan dalam dunianya. Terlebih lagi bila para pengambil kebijakan di bidang pendidikan mempunyai integritas yang memadai untuk kembali berpijak pada fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebijakan di bidang pendidikan yang dihasilkan pun akan menguatkan warga bangsa dan Negara, untuk menjadi dirinya sendiri dengan sepenuhnya merdeka. □

1. Tulisan ini dielaborasi dari diskusi bersama Dr. Agus Nuryanti

## “NOT ONE LESS”, TAK KURANG SATUPUN

PURWONO NUGROHO ADHI

Masih teringat dalam benak saya, sebuah film karya sutradara Zhang Yimou yang berjudul “Not One Less” (tak kurang satupun). Dalam film ini disuguhkan sebuah realitas pendidikan di daerah pedesaan terpencil di Cina. Cerita berpusat pada Wei Minzhi, seorang guru pengganti yang harus menggantikan guru Gao di sekolah dasar desa Shuiquan. Berbagai masalah dihadapi Wei, dari kekurangan sarana pengajaran, gedung sekolah yang rusak, latar belakang siswa yang begitu miskin, hingga keterpaksaan Wei sendiri. Dalam perjalanan, masalah semakin memuncak, ketika seorang anak bernama Zhang terpaksa tidak bersekolah karena bekerja ke kota untuk membantu keluarganya yang miskin. Wei Minzhi tergerak hatinya untuk membawa kembali Zhang bersekolah, namun upaya tersebut harus menempuh jalan yang terjal dan sulit. Kepala desa tidak bersedia untuk memberikan uang untuk membeli tiket bus ke kota, masalah perjalanan ke kota yang jaraknya sangat jauh, dan kesulitan dalam menemukan Zhang. Akhirnya, Wei Minzhi memutuskan untuk mencari uang sendiri, dan merekrut para siswa yang tersisa untuk membantu mengumpulkan uang dan mencarinya sendiri ke kota.

Film ini memberikan pesan yang mendalam bagi dunia pendidikan kita. “Not One Less”, tak satupun dari siswa sekolah ditinggalkan, tak satupun dari mereka tidak diperhatikan, tak satupun dari mereka disingkirkan, dihiraukan, dan dibuang. Siswa adalah subyek. Subyek yang pada prinsipnya adalah seorang manusia yang perlu ditumbuhkan dan diberdayakan. Begitulah pendidikan, memanusiakan manusia muda, menurut Dryarkara.

Entah mengapa, iklim pendidikan kita saat ini jauh dari pesan film “Not One Less”. Dunia pendidikan seakan menjadi rimba kejam persaingan dan pertarungan yang kadang tak lagi adil dan manusiawi. Siswa dijadikan obyek sasaran yang pada gilirannya hanya sebagai sebuah komoditas kapitalisasi. Hal inilah yang mengemuka dalam sebuah kesempatan diskusi FKGA (Forum Komunikasi Guru Agama) bersama Agus Nuryatno, seorang dosen Fakultas Tarbiyah UIN (Universitas Islam Nasional). “Korporatisasi pendidikan” itulah yang seakan dimunculkan untuk mengatakan betapa “gamangnya” dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan seakan mulai terjun bebas dalam euforia liberalisasi. Segala hal

dikomersialkan, diukur dan distandarisasi. Tak ada ruang bagi mereka yang miskin dan yang lemah. Pendidikan menjadi lahan empuk korporatisasi. Ingatkah UU BHP yang sudah dihapus oleh MK dan juga maraknya sekolah ber-SBI, RSBI, dan Sekolah Regular?

Entah paradigma atau cara pandang apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh para penentu atau pemegang kebijakan pendidikan di negeri ini. Mengapa ada begitu banyak istilah dalam dunia ekonomi digunakan dalam konteks pendidikan. Proses administratif pendidikan, pola pembelajaran dan standarisasi akhirnya menciptakan ruang-ruang kesenjangan yang semakin melebar. Kesenjangan antara mereka yang kuat secara ekonomi maupun akses dan mereka yang kurang atau lemah. Medan "Darwinisme" pendidikan seperti dikuatirkan oleh mendiang Mangunwijaya seakan semakin nyata. Lahirlah kelas-kelas "reproduktif" yang semakin menekan kelas-kelas yang "tak mampu bersaing". Coba kita tengok pengalaman Ujian nasional yang menyisakan tangis dan nestapa bagi mereka yang tak mempunyai akses dan kualitas yang seharusnya tak pernah bisa disamakan. Program akselerasi, standarisasi mutu sekolah dan beban biaya pendidikan yang semakin tinggi seakan membuat pendidikan semakin deskriminatif.

"Not One Less", tak kurang satupun, rasa-rasanya bukan lagi

nada dasar yang ingin digemakan dalam pendidikan kita. Biarlah iklim kompetisi menjadi medan untuk menjaring siapa yang bertahan, siapa yang paling kuat, dan menciptakan kembali calon-calon yang mengisi ruang-ruang kekuasaan. Tak perlu lagi memikirkan mereka yang tertinggal, yang lemah dan tak berdaya. Entahlah siapa yang bisa berpikir layaknya Wei Minzhi, seorang guru pengganti dalam film "Not One Less" ini, yang memikirkan mereka yang terbuang untuk diajak bersama kembali. Kembali dan bersama-sama meraih masa depan, tak ada siapa yang lebih berhak harus meraihnya, siapapun, siapa saja berhak untuk meraihnya. "Not One Less" ...tak kurang satupun....

**Purwono Nugroho Adhi**, Penikmat Kerja Budaya

## Pancasila sebagai Ideologi Pendidikan di Indonesia

Oleh Listia

**D**i tengah dunia yang diwarnai gaya hidup pragmatis, dipenuhi pilihan-pilihan yang berorientasi pada kepentingan bernilai sesaat dan individual, mempertanyakan ideologi pendidikan di Indonesia tampaknya seperti mengharap hujan di musim kemarau. Tetapi mempertanyakan hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong evaluasi agar proses pendidikan bisa menghasilkan situasi yang lebih baik bagi masa depan generasi muda. Apa yang mendorong perlunya mempertanyakan ideologi pendidikan, tidak lain adalah adanya gejala dalam praktek pendidikan di Indonesia yang apabila dicermati berorientasi pada upaya memenangkan persaingan global dengan melupakan kompleksitas persoalan ketidakadilan yang belum terselesaikan sejak awal kemerdekaan.

Pendidikan sebagai strategi sebuah bangsa untuk menghadapi masa depan yang penuh resiko, membutuhkan fondasi filosofi yang jelas dan tegas, yang akan menuntun semua pengambil kebijakan setia pada cita-cita kebersamaan sebagai bangsa. Fondasi filosofis ini tentu sudah dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sudahkah tujuan pendidikan kita mengarahkan praktek pendidikan yang tidak berorientasi pada pragmatisme penguasaan materi dan pemenuhan kepentingan individual jangka

pendek? Pendidikan yang mendasarkan diri pada sila Ketuhanan yang Mahaesa semestinya mengarahkan praktek pendidikan menjadi upaya menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Dalam rumusan Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kekuatan kodrati agar peserta didik mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Sudahkah pendidikan kita menjadi upaya mengembangkan jati diri, harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia? Sudahkah pelayanan pendidikan yang dirasakan oleh seluruh warga bangsa memperkuat modal social yang menjadi persatuan Indonesia sebagai berkat bukan hanya bagi penduduk nusantara tetapi penduduk dunia? Sudahkah praktek pendidikan dilakukan dengan tujuan dan cara yang meningkatkan kesantunan atau keadaban sebagai buah dari kebijaksanaan? Dan sudahkah pendidikan menjadi upaya menciptakan keadilan sosial?

Ada baiknya kita mencermati beberapa hal, *pertama*, mulai muncul klasifikasi kesempatan belajar dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam empat kelompok, yaitu kelompok anak-anak pandai dan kaya, anak orang kaya tapi tidak pandai, anak miskin yang pandai dan anak miskin yang tidak pandai. *Kedua*, makin sulit dijumpai guru dan pihak sekolah